

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 secara jelas dicantumkan bahwa salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, bidang pendidikan memegang peranan penting.

Salah satu usaha yang ditempuh dalam bidang pendidikan melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah : Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional (pasal 3). Salah satu konsiderans Undang-undang tersebut dikatakan :

"Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam perwujudan masyarakat warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945".

Makna yang terkandung dalam tujuan pendidikan tersebut adalah ingin mewujudkan misi pendidikan yang berkaitan erat dengan pembinaan sumber daya manusia yang berkualitas. Apabila dinilai dari keberhasilan dan perwu-

judan potensi yang dimiliki, manusia itu memberikan kontribusi bermakna bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya.

Upaya mewujudkan tujuan tersebut di atas, antara lain dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan, meskipun pada dasarnya masalah pendidikan di Indonesia menghadapi permasalahan. C.E Beebby (1966) mengungkapkan bahwa kualitas dan kuantitas pendidikan merupakan suatu dilema yang dihadapi negara berkembang. Kendala dalam meningkatkan kualitas pendidikan, diantaranya karena masih terbatasnya kemampuan guru di seluruh tanah air dalam berbagai aspek.

Di pihak lain, pembangunan yang terjadi mengalami perubahan sosial yang semakin cepat, yang proses perkembangannya dipengaruhi oleh norma dan nilai budaya masyarakat. Soepardjo Adikusomo (1989 : 42) mengatakan bahwa :

"Perubahan sosial di daerah pedesaan memperlihatkan ciri-cirinya yaitu di satu pihak bergerak linier oleh dorongan survival nilai budaya tradisional, di lain pihak telah dicapai tingkat majunya perkembangan masyarakat desa dalam pengetahuan yang diperoleh dari usaha pendidikan dan usaha-usaha lain, seperti oleh media massa dan komunikasi massa".

Dari uraian dan kutipan di atas jelaslah bahwa perlu adanya pendidikan, dan latihan yang dapat membentuk sikap untuk mau mengembangkan keterampilan, sehingga dapat membentuk manusia yang dapat berpikir terbuka dan memiliki

kesadaran selalu menggali potensi yang ada, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini.

Upaya peningkatan mutu pendidikan mendapat prioritas dalam GBHN 1988 yang menitikberatkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan. Salah satu pendidikan dalam jalur pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas (pasal 15).

Peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas mempunyai kaitan dengan mutu pendidikan pada jenjang selanjutnya yaitu Perguruan Tinggi. Secara tidak langsung mempunyai kaitan juga dengan upaya peningkatan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional, sebagai tenaga kerja (menengah). Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengelolaan sekolah menengah harus menjadi perhatian yang serius, terutama dalam usaha melakukan pembinaan kemampuan profesional guru.

Dalam organisasi sekolah, kepala sekolah menduduki posisi penting dalam menentukan kegiatan-kegiatan sekolah. Keberhasilan kegiatan pendidikan di sekolah sangat tergantung pada upaya yang dilakukan kepala sekolah. Engkoswara (1987 : 43) mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan penyelenggaraan sekolah yaitu Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau pembinaan sumber daya, yang meliputi manusia, program pendidikan atau sumber

belajar dan fasilitas.

Ketiga kegiatan di atas merupakan fungsi pokok administrasi pendidikan, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dan harus dilaksanakan, sebagai tanggung jawab kepala sekolah. Hal ini sesuai dengan PP 28 Tahun 1990, sebagai berikut : "Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana."

Kepala sekolah sebagai orang yang menduduki posisi tertinggi di sekolah, mempunyai tugas mempengaruhi guru dan personil lainnya dalam menggerakkan organisasi sekolah. Hal ini dapat dimengerti karena guru merupakan *the man behind the system* program dan faktor kunci yang turut menentukan keberhasilan pendidikan. Sehubungan dengan hal ini, Oteng Sutisna (1987 :109) mengemukakan bahwa :

Kualitas program pendidikan bergantung tidak saja pada konsep-konsep program yang cerdas, tapi juga pada personil pengajar yang mempunyai kesanggupan dan keinginan untuk berprestasi. Tanpa personil yang cakap dan efektif, program pendidikan yang dibangun di atas konsep-konsep yang cerdas serta dirancang dengan teliti pun tidak dapat berhasil.

Jadi jelaslah bahwa personil, khususnya guru bagi kepala sekolah merupakan patner yang tidak dapat diabaikan. Oleh karenanya dibutuhkan upaya kepala sekolah, pengawas dan pihak-pihak lain untuk dapat membantu guru

dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya perhatian kepada diri guru, diharapkan pengelolaan proses belajar mengajar sebagai kunci pelaksanaan pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Di samping itu, sosok guru yang mampu berperan sebagai tokoh yang terpercaya dapat dijadikan teladan dalam masyarakat.

Guru sebagai teladan dalam masyarakat, karena ia berperan sebagai sosok tubuh yang cukup ideal, berpendidikan khusus, berwibawa, berpengetahuan lebih dari pada masyarakat, berdedikasi pengabdian, dan mampu memberikan keteladanan (Achmad Sanusi, 1990 : 20).

Dengan demikian, agar guru dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab penuh dedikasi, dapat menyesuaikan diri dengan laju pertumbuhan ilmu pengetahuan dan arus informasi, dibutuhkan usaha kepala sekolah dan pengawas untuk pengembangan profesionalnya.

Pengembangan profesional atau profesionalisasi tenaga pengajar harus merujuk kepada proses peningkatan kualitas kemampuan. Oteng Sutisna (1989 : 359) mengemukakan profesionalisasi ialah suatu proses perubahan dalam status suatu pekerjaan dari yang non profesi atau semu profesi ke arah profesi yang sungguh". Jadi profesionalisasi merupakan suatu proses dinamis yang terus menerus berkembang ke arah pencapaian kriteria profesi yang ideal.

Adapun ciri utama atau karakteristik suatu profesi berdasarkan hasil studi pengembangan model pendidikan profesional tenaga kependidikan adalah fungsi dan signifikansi sosial, keterampilan atau keahlian, pemerolehan keterampilan dengan menggunakan metode ilmiah, batang tubuh ilmu, masa pendidikan, aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional, kode etik, kebebasan untuk memberikan judgement tanggung jawab profesional dan otonomi, pengakuan dan imbalan yang layak (Achmad Sanusi, 1991 : 20).

Pengembangan kemampuan profesional guru diperlukan dalam pendidikan, karena guru sebagai manusia pada hakikatnya memiliki potensi dan kebutuhan untuk mengembangkan dan merealisasikan dirinya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guru dituntut untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional. Dengan kemampuan profesional, diharapkan tujuan pendidikan di Sekolah Menengah Atas dapat terlaksana secara efektif.

Dengan demikian, agar tujuan Sekolah Menengah Atas terlaksana secara efektif, maka kepala sekolah sebagai penanggung jawab tertinggi di sekolah, hendaknya mengelola usaha pembinaan kemampuan profesional guru secara profesional. Fakry Gaffar, dkk. (1991) dalam makalah Dampak Globalisasi Terhadap Pemantapan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia dalam Bangkajang Kedua menjelaskan, jika pendidikan dianggap sebagai suatu investasi nasional untuk masa depan bangsa, maka perlu ditangani secara profesional. Manajemen pendidikan sebagai alat untuk pencapaian tujuan



pendidikan nasional memerlukan dukungan teknologi dan pengelolaan secara profesional.

Dalam melakukan berbagai kegiatan, kepala sekolah hendaknya melaksanakan fungsi-fungsi administrasi pendidikan. A.O.B Situmorang (1990) menyatakan bahwa, kepala sekolah mempunyai lima fungsi.

Empat dari aspek fungsional tersebut berlangsung dalam lingkungan organisasi yang bersangkutan, sedangkan yang kelima itu memerlukan kemampuan untuk mengembangkan interaksi positif dengan masyarakat sekitar. Empat pertama itu sendiri penyediaan ketenagaan (staffing) dan pembinaannya (personnel development), pelayanan kesiswaan atau kemuridan (pupil personnel service), pengembangan program dan pengelolaan gedung, juga meliputi pembiayaan dan pemeliharannya. Sedangkan fungsi ke lima adalah hubungan sekolah dan masyarakat.

Demikian pula Castetter (1981 :48) menjelaskan garis besar fungsi dan tanggung jawab kepala sekolah, sebagai berikut :

- a. Program pendidikan; meliputi struktur tujuan, pelayanan kurikulum, pengajaran, pelayanan murid, pelayanan staf dan informasi.
- b. Dukungan logistik, meliputi pembiayaan fasilitas, keamanan, pelayanan dan informasi.
- c. Personil; meliputi perencanaan, rekrutmen, seleksi, penilaian, pembinaan, kompensasi, bargaining, keamanan, kesejahteraan, perawatan dan informasi.
- d. Perencanaan; meliputi rencana strategis, rencana pengembangan, rencana pelaksanaan, rencana proyek dan informasi.
- e. Hubungan eksternal; meliputi hubungan dengan pemerintah pusat dan daerah, hubungan masyarakat dan informasi.

Bila diperhatikan fungsi kepala sekolah dalam melakukan tanggung jawab di sekolah, maka peningkatan mutu

pendidikan Sekolah Menengah Atas, dipengaruhi oleh berbagai pengelolaan kegiatan yang dilakukan kepala sekolah dalam keseluruhan kegiatan. Salah satu keberhasilan proses pendidikan di sekolah ditentukan oleh sejauh mana kepala sekolah melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan personil secara efektif dan efisien.

Selain kepala sekolah, tugas pembinaan kemampuan profesional guru juga dilakukan oleh pengawas. Pembinaan kemampuan profesional guru yang diberikan oleh pengawas hendaknya dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi guru dalam pelaksanaan tugas. Pembinaan teknis yang diberikan pengawas merupakan pengendalian kegiatan operasional pendidikan di sekolah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan dengan cara pemantauan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan profesional guru.

Untuk mewujudkan personil yang benar-benar mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi dalam masyarakat, para kepala sekolah hendaknya melakukan usaha pembinaan kemampuan profesional guru secara sistematis dan terprogram.

Demikian pula pengawas Dikmenum selaku partner kepala sekolah dalam membantu sekolah mencapai tujuan sekolah, dapat memberikan bantuan, baik berupa pengetahuan, keter-



ampilan maupun dorongan kepada guru dalam melaksanakan tugas, sehingga guru lebih profesional dalam melaksanakan tugas, dan mampu menyelesaikan berbagai masalah.

Dalam pelaksanaan tugas guru, tampaknya masih dirasakan sejumlah masalah dan hambatan. Hal ini disebabkan usaha melaksanakan pembinaan kemampuan profesional guru, menyangkut berbagai aspek yang saling berkaitan dan kompleks. Aspek-aspek tersebut antara lain kompetensi kepala sekolah dalam hal pembinaan, kompetensi pengawas dalam hal pembinaan, usaha yang diberikan kepala sekolah dalam hal dana, kesempatan, fasilitas, kondisi sekolah, kualitas para guru, motivasi yang dapat meningkatkan semangat, niat dari para guru, faktor geografis, potensi masyarakat, sosial budaya, informasi dan keikutsertaan instansi terkait. Kemudian, aspek yang perlu diperhatikan kepala sekolah selain aspek-aspek yang telah disebutkan di atas adalah aspek pemahaman tentang kode etik atau etika profesional.

Dalam kaitannya dengan permasalahan di atas, dirasakan bahwa usaha pembinaan kemampuan profesional terhadap diri guru merupakan hal yang penting dilakukan oleh setiap kepala sekolah. Dengan pembinaan diharapkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi dalam era informasi,

yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan sekolah khususnya dan tujuan nasional umumnya. Oleh karena itu, usaha pembinaan kemampuan profesional guru harus menjadi perhatian utama kepala sekolah, pengawas dan pihak-pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan.

Upaya pembinaan kemampuan profesional guru di Sekolah Menengah Atas dilakukan melalui usaha kepala sekolah dan pengawas dalam mengembangkan tenaga pengajar (guru). Usaha-usaha tersebut antara lain pengadaan, pengalokasian, dan pemberian dana, kesempatan, fasilitas, dan pemberian motivasi, sehingga guru mendapat pengetahuan dan keterampilan melalui bantuan tersebut dengan ikut sertanya guru dalam berbagai kegiatan seperti : penataran-penataran, pertemuan-pertemuan ilmiah, diskusi dan sebagainya.

Untuk mewujudkan usaha di atas, salah satu usaha yang harus dilakukan kepala sekolah adalah menjalin kerja sama. Misalnya kerja sama dengan BP3, tokoh-tokoh masyarakat, dan instansi-instansi yang ada di dalam lingkungan sekolah. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan partisipasi kepada kepala sekolah dalam usaha mengelola sekolah umumnya, dan membina kemampuan profesional guru khususnya. Pengawas sebagai personal yang bertugas membantu sekolah hendaknya dapat membantu kepala sekolah dan guru dalam menambah pengetahuan dan keterampilan serta

motivasi yang dapat meningkatkan semangat kerja, minat melakukan berbagai kegiatan, yang dapat mendukung terciptanya kemampuan profesional guru.

Kerja sama antara kepala sekolah dengan pengawas dalam hal pembinaan kemampuan profesional guru, hendaknya didasarkan pada tujuan peningkatan kemampuan tenaga kependidikan yang mampu melaksanakan tugas. Walaupun tugas yang diemban oleh kedua personil tersebut mempunyai ruang lingkup tugas yang berbeda, akan tetapi, dalam pelaksanaan pembinaan kemampuan profesional guru mempunyai tugas yang sama yaitu menciptakan tenaga kependidikan yang profesional.

## **B. Pemasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Beberapa isue permasalahan, sehubungan dengan usaha peningkatan mutu melalui pembinaan kemampuan profesional guru Sekolah Menengah Atas Negeri di Perwakilan Simeulue Kabupaten Aceh Barat, dikelompokkan atas isu pihak guru, kepala sekolah, pengawas, Kakandepdikbud, Pemerintah Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat. Masalah ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kurangnya kesempatan guru mengembangkan diri. Hal ini dapat mengurangi kemauan diri guru untuk meningkatkan

kemampuannya dalam melaksanakan tugas. Banyak guru mengajar bidang studi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, atau sering terjadi tugas rangkap. Banyak guru yang tidak mendapat kesempatan mengikuti berbagai penataran dan latihan yang dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan.

- 2) Rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat mengurangi hasrat atau kemampuan masyarakat dalam memberikan fasilitas belajar pada siswa dan bantuan atau dukungan terhadap peningkatan pendidikan di sekolah.
- 3) Kurangnya fasilitas sekolah. Hal ini menyebabkan kepala sekolah lebih banyak menitikberatkan kegiatan pendidikan pada pembenahan fisik sekolah dan pelaksanaan administrasi sekolah.
- 4) Faktor geografis, dimana letak sekolah membutuhkan transportasi dan waktu untuk sampai ke daerah lain, ke tingkat II, maupun ke tingkat I. Ditambah lagi hubungan antara satu kecamatan dengan kecamatan lain lebih banyak dilalui dengan transportasi laut.
- 5) Belum adanya pengawas yang berdomisili di ibu kota kabupaten maupun di ibu kota Perwakilan Simeulue.

Berdasarkan isue-isue yang dikemukakan di atas, maka kepala sekolah sebagai penanggung jawab tertinggi di

sekolah, dan orang yang lebih tahu serta dekat dengan personil sekolah, khususnya guru, perlu melakukan usaha yang dapat menunjang berkembangnya kemampuan profesional guru. Guru, sebagai manusia menghadapi berbagai masalah, baik dari keluarga, lingkungan, keadaan siswa, masyarakat, dan arus globalisasi. Semua itu dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya di sekolah. Pengawas sebagai orang yang bertanggung jawab dalam membantu sekolah, dapat memberikan semangat, pengetahuan dan keterampilan, yang mengarah kepada pemecahan masalah kepala sekolah, baik yang dihadapi guru maupun personil lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya. Sekolah yang menjadi sasaran penelitian ini adalah SMA Negeri di Perwakilan Simeulue Kabupaten Aceh Barat.

Pada tahun 1992/1993 di Perwakilan Simeulue Kabupaten Aceh Barat terdapat dua SMA Negeri, yaitu di Kecamatan Simeulue Timur dan Simeulue Tengah. Di tiga Kecamatan lagi terdapat tiga SMA Swasta, yaitu berada di Kecamatan Simeulue Barat, Kecamatan Simeulue Timur dan Kecamatan Teupah Selatan, sedangkan di Kecamatan Salang tidak ada SMA, baik negeri maupun swasta. Data SMA di Perwakilan Simeulue Kabupaten Aceh Barat dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1  
Data Jumlah SMA di Perwakilan Simeulue  
Kabupaten Aceh Barat

No.	Kecamatan	Negeri	Swasta
1.	Simeulue Timur	1	1
2.	Simeulue Barat	-	1
3.	Simuelue Tengah	1	-
4.	Salang	-	-
5.	Teupah Selatan	-	1

Sumber : Kantor Depdikbud Kabupaten Aceh Barat D.I. Aceh.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sekolah menengah atas negeri hanya dua buah. Ditinjau dari letak geografis kelima kecamatan yang ada di Perwakilan Simeulue Kabupaten Aceh Barat, antar kecamatan sangat sukar untuk ditempuh dalam waktu yang singkat, karena daerah ini dihubungkan dengan laut, yang sarana transportasinya masih kurang memadai, dan suasana alam yang kurang menunjang. Prasarana transportasi darat masih dalam penggarapan, angkutan umum di daerah ini baru dapat menempuh sejauh 12 km dari pusat kota Perwakilan, sedangkan kondisi jalan banyak berlubang dan jembatan sering terputus akibat banjir.

Jika dilihat dari keadaan ekonomi masyarakat yang umumnya tergolong pada ekonomi menengah ke bawah, maka kebutuhan masyarakat akan sekolah menengah sebagai lembaga yang mempersiapkan tenaga kerja tingkat menengah merupakan



suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus, agar masyarakat dapat menyekolahkan anaknya pada SMA sesuai dengan kemampuannya.

Keberadaan SMA Negeri yang belum memadai sedangkan kebutuhan masyarakat akan pendidikan SMA cukup tinggi. Tingginya hasrat untuk sekolah tersebut dapat dilihat dari upaya masyarakat untuk menyelenggarakan sekolah swasta di daerah ini. Untuk lebih jelasnya mengenai keinginan masyarakat terhadap keberadaan SMA, dapat dilihat dari jumlah siswa yang ada di SMA Swasta, seperti tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2  
Keadaan SMA Swasta di Perwakilan Simeulue  
Kabupaten Aceh Barat

No.	Sekolah dan Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Guru	Status Guru	Status Gedung
		I	II	III			
1.	SMA Teupah Jaya Teupah Selatan	8	9	13	12	GTT	Menumpang
2.	SMA Swasta Simeulue Timur	20	17	14	13	GTT	Menumpang
3.	SMA Mutiara Simeulue Barat	10	12	10	14	GT & GTT	Menumpang

Sumber : Kantor Depdikbud Kabupaten Aceh Barat

Dari data di atas tergambar bahwa jumlah siswa pada SMA Swasta rata-rata 30 orang, walaupun dalam keadaan yang

sangat sederhana, dan tidak memiliki berbagai fasilitas. Siswa-siswa tetap melakukan kegiatan belajar pada tiap hari.

Apabila kita perhatikan SMA Negeri yang ada di dua kecamatan, juga masih jauh dari kelengkapan yang dapat menghasilkan lulusan sekolah yang bermutu baik. Di bawah ini digambarkan keadaan fisik SMA Negeri sinabang dan Kampung Aie.

Tabel 1.3  
Keadaan fisik SMA Negeri Sinabang dan SMA Negeri  
Kampung Aie di Perwakilan Simelue  
Kabupaten Aceh Barat

S e k o l a h	Jml Ruang Kelas yang dimiliki		Ruang Lab dan Ruang lain yang dimiliki	
	Baik	Rusak	Lab IPA	Pustaka
SMAN Sinabang	7	3	1	1
SMAN kampung Aie	6	-	-	-

Sumber : Kantor Depdikbud Kabupaten Aceh Barat

Apabila dilihat dari keadaan kelengkapan fisik SMA Negeri, maka keadaan tersebut masih jauh dari kesempurnaan dan kurang menunjang terlaksananya kegiatan belajar. Dalam tabel di atas tergambar bahwa SMA Negeri yang ada di Perwakilan Simeulue Kabupaten Aceh Barat, hanya satu SMA Negeri yang memiliki laboratorium IPA (meliputi biologi,

fisika, dan kimia), serta perpustakaan sekolah. Sedangkan SMA Negeri lainnya belum memiliki laboratorium IPA dan perpustakaan. Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak semata-mata didasarkan pada kelengkapan fasilitas dan keadaan siswanya, tetapi juga bagaimana pengelola proses belajar mengajarnya. Sementara itu kunci keberhasilan pengelolaan sekolah menengah atas, terutama terletak pada kesuksesan pelaksanaan pembina-pembina sekolah tersebut.

Berdasarkan pemikiran itulah maka penulis terdorong untuk mengkaji pembinaan kemampuan profesional guru oleh kepala SMA Negeri dan pengawas di Perwakilan Simeulue Kabupaten Aceh Barat.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti berpijak pada PP RI No 29 Tahun 1990 Bab I Pasal 1 ayat (2) menjelaskan pendidikan menengah umum adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa. Bab II pasal 2 menjelaskan pendidikan menengah, bertujuan :

- 1) Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk

mengembangkan diri sejalan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.

- 2) Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan sambungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya.

Sekolah Menengah Atas, yang merupakan salah satu jenjang pendidikan yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis pendidikan formal, harus dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, kepala sekolah sebagai pengelola tertinggi dari organisasi sekolah harus dapat mengelola kegiatan sekolah secara keseluruhan. Banyak kegiatan kepala sekolah antara lain pembinaan tenaga kependidikan yang ada di sekolahnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah Bab VI pasal 14 ayat (1) disebutkan :

Kepala sekolah dari sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertanggung jawab kepada Menteri atau Menteri lain yang terkait atas penyelenggaraan : (1) kegiatan pendidikan; (2) administrasi sekolah; (3) pembinaan tenaga kependidikan lainnya; dan (4) pendayagunaan sarana dan prasarana.

Dalam pasal 25 ayat (6) disebutkan bahwa : "Penyelenggaraan sekolah menengah berkewajiban untuk menilai dan membina keseluruhan kegiatan pendidikan di bawah naungan-

nya."

Berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu tugas kepala sekolah dan pengawas adalah membina atau mengembangkan kemampuan profesional guru. Dalam pedoman penyelenggaraan administrasi sekolah menengah disebutkan bahwa : "Untuk memanfaatkan tenaga kerja yang tersedia sehingga menjadi tenaga yang dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka harus diadakan pembinaan pegawai baik tenaga edukatif maupun tenaga administrasi." (Depdikbud, 1989 : 164).

Pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan situasi dan kondisi daerah serta keadaan sekolah. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1990 Bab XIII Pasal 32 ayat (1),(2), dan (3) menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan meliputi perbaikan, perluasan, pendalaman, dan penyesuaian pendidikan melalui peningkatan mutu baik penyelenggaraan kegiatan pendidikan maupun pencatatan penunjangnya.
- 2) Pada sekolah menengah dapat dilakukan uji coba gagasan baru yang diperlukan dalam rangka pengembangan pendidikan menengah.
- 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengurangi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah menengah yang bersangkutan. (UUSPN, 1990 : 65).

Pelaksanaan pembinaan kemampuan profesional guru Sekolah Menengah Atas Negeri Perwakilan Simeulue Kabupaten Aceh Barat merupakan tanggung jawab kepala sekolah,

baik selaku administrator, maupun selaku supervisor. Oleh karenanya dituntut usaha kepala sekolah dan pengawas dalam meningkatkan kemampuan profesional guru. Dengan usaha tersebut, diharapkan guru dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Bab VIII pasal 33 dan Bab XIII pasal 47 ayat (1) menjelaskan :

- 1) Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau keluarga peserta didik.
- 2) Masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. (UUSPN, 1990 : 205-208).

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Sejauh mana pembinaan kemampuan profesional guru yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas terhadap guru-guru SMA Negeri di Perwakilan Simeulue Kabupaten Aceh Barat?*

Secara lebih rinci permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimana persepsi kepala sekolah tentang tugasnya sebagai pembina kemampuan profesional guru di sekolah?
- 2) Usaha apa yang dilakukan kepala sekolah dalam peranannya sebagai administrator dan supervisor sekolah untuk



- meningkatkan kemampuan profesional guru?
- 3) Kendala apa yang dihadapi kepala sekolah dalam pembinaan kemampuan profesional guru, dan cara bagaimana yang ditempuh kepala sekolah?
  - 4) Kegiatan pembinaan profesional apa yang dilaksanakan pengawas, dan hambatan apa yang dihadapinya dalam meningkatkan kemampuan profesional guru?
  - 5) Bagaimana persepsi guru tentang pembinaan profesional yang dilaksanakan kepala sekolah dan pengawas?
  - 6) Apa kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan tugasnya, dan kegiatan-kegiatan apa yang diberikan kepala sekolah dan pengawas dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalnya?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang usaha apa yang telah dilakukan kepala SMA Negeri dalam melaksanakan peranannya sebagai administrator dan supervisor pendidikan yang efektif di sekolah, dan dalam membina kemampuan profesional guru, dan usaha apa yang telah dilakukan pengawas sebagai supervisor dalam meningkatkan kemampuan profesional guru.

## 2. Tujuan Khusus

Bertitik tolak pada tujuan umum di atas, maka tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mencari makna terhadap usaha-usaha yang dilakukan kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor pendidikan, dan usaha pengawas sebagai supervisor dalam melaksanakan program pembinaan kemampuan profesional guru SMA Negeri di Perwakilan Simeulue Kabupaten Aceh Barat. Hal-hal yang ingin dideskripsikan dan dianalisis adalah :

- 1) Persepsi kepala sekolah tentang tugasnya sebagai pembina kemampuan profesional guru di sekolah.
- 2) Usaha yang dilakukan kepala sekolah dalam peranannya sebagai pembina kemampuan profesional guru.
- 3) Kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam pembinaan guru, dan cara yang ditempuh kepala sekolah.
- 4) Kegiatan pembinaan profesional yang dilaksanakan oleh pengawas dan hambatan yang dihadapi pengawas.
- 5) Persepsi guru tentang pembinaan profesional yang dilaksanakan kepala sekolah dan pengawas.
- 6) Kendala yang dihadapi guru untuk melaksanakan tugasnya, dan kegiatan yang diberikan kepala sekolah serta pengawas dalam rangka pembinaan profesionalnya.

#### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang sasaran utamanya adalah usaha yang dilakukan kepala sekolah selaku administrator dan supervisor pendidikan di sekolah terutama dalam hal pengadaan dan pelaksanaan program pembinaan kemampuan profesional guru, sehingga guru dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian untuk mengetahui usaha pengawas sebagai supervisor dalam meningkatkan kemampuan profesional guru.

Masalah di atas penting untuk diteliti karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan usaha pembinaan profesional yang dilakukan kepala sekolah di satu pihak dan pengawas Kanwil Depdikbud D.I. Aceh di pihak lain, selaku personil yang bertanggung jawab untuk membantu sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Melalui usaha pengawas, diharapkan guru dapat menciptakan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan tugas.

Penelitian yang bersifat deskriptif ini dapat mengungkapkan makna-makna baru yang berguna bagi peningkatan dan penyempurnaan kegiatan administrasi personil dan supervisi pengajaran di sekolah, dalam bentuk pembinaan profesional terhadap guru-guru SMA Negeri. Di samping itu,

sebagai masukan bagi pihak yang berwenang dalam usaha meningkatkan dan mengembangkan kemampuan guru dalam pelaksanaan tugas. Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

### **1. Kegunaan Teoritis**

Dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis pengelolaan SMA Negeri sebagai lembaga pendidikan formal oleh kepala sekolah. Pelaksanaan tugas kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor pendidikan di sekolah, baik ditinjau dari segi pengadaan, pelaksanaan, pemberian dan penjalinan hubungan kerja sama dalam hal dana, kesempatan, fasilitas, maupun segi teknis pemberian motivasi terhadap guru, sehingga guru mampu mengembangkan kemampuan profesinya. Selain itu, dapat diketahui pula program yang dilaksanakan pengawas Kanwil Depdikbud D.I. Aceh dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan serta dorongan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan profesional. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan personil tenaga kependidikan, khususnya sebagai langkah untuk mempersiapkan guru Sekolah Menengah Atas yang lebih profesional.

## 2. Kegunaan Praktis

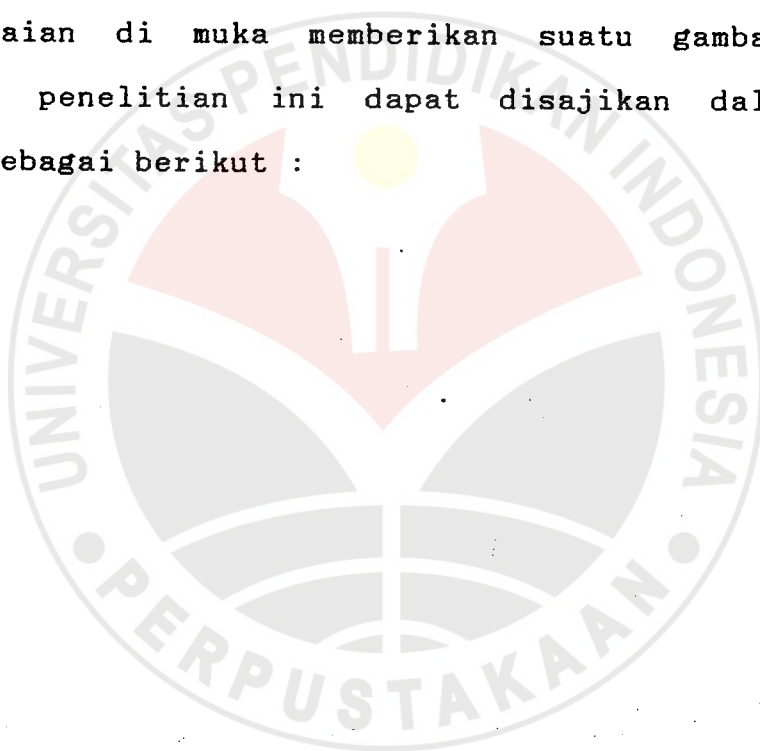
Dipandang dari aspek ini, maka masalah yang diteliti dapat memberikan gambaran yang jelas tentang usaha yang harus dilakukan dalam usaha pembinaan kemampuan profesional guru oleh kepala-kepala sekolah, dalam kedudukannya sebagai administrator dan supervisor pengajaran di sekolah. Pertama, bagi kepala sekolah; hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan terhadap usaha-usaha yang harus dilakukan dalam membina dan membimbing guru, sehingga guru memiliki kemampuan profesional, yang pada akhirnya guru mampu melaksanakan tugasnya dan mampu mengatasi permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran tugasnya.

Kedua, sebagai masukan bagi pengawas Kanwil Depdikbud Propinsi D.I. Aceh, dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan pelayanan pemberian bantuan, saran, bimbingan kepada guru agar dapat meningkatkan kemampuan profesional pada masa yang akan datang. Ketiga, sebagai masukan bagi pemerintah (instansi terkait) sebagai penanggung jawab teknis administrasi pengelolaan Sekolah Menengah Atas, seperti : pemerintah daerah, kepala bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Aceh, Kakandep Dikbud Kabupaten dan Kakandep Dikbudcam, dalam penyempurnaan pelaksanaan kegiatan koordinasi yang efektif dan penyempurnaan kegiatan-kegiatan pembinaan profesional guru.

Kedua segi kegunaan tersebut perlu dikaji dan ditelaah secara ilmiah dalam mencapai sasaran yang diharapkan dapat menunjang terlaksananya administrasi dan supervisi sekolah. Administrasi dan supervisi sekolah merupakan bagian dari kegiatan administrasi sekolah yang dapat menunjang terlaksananya pembinaan profesional guru ke arah yang lebih baik.

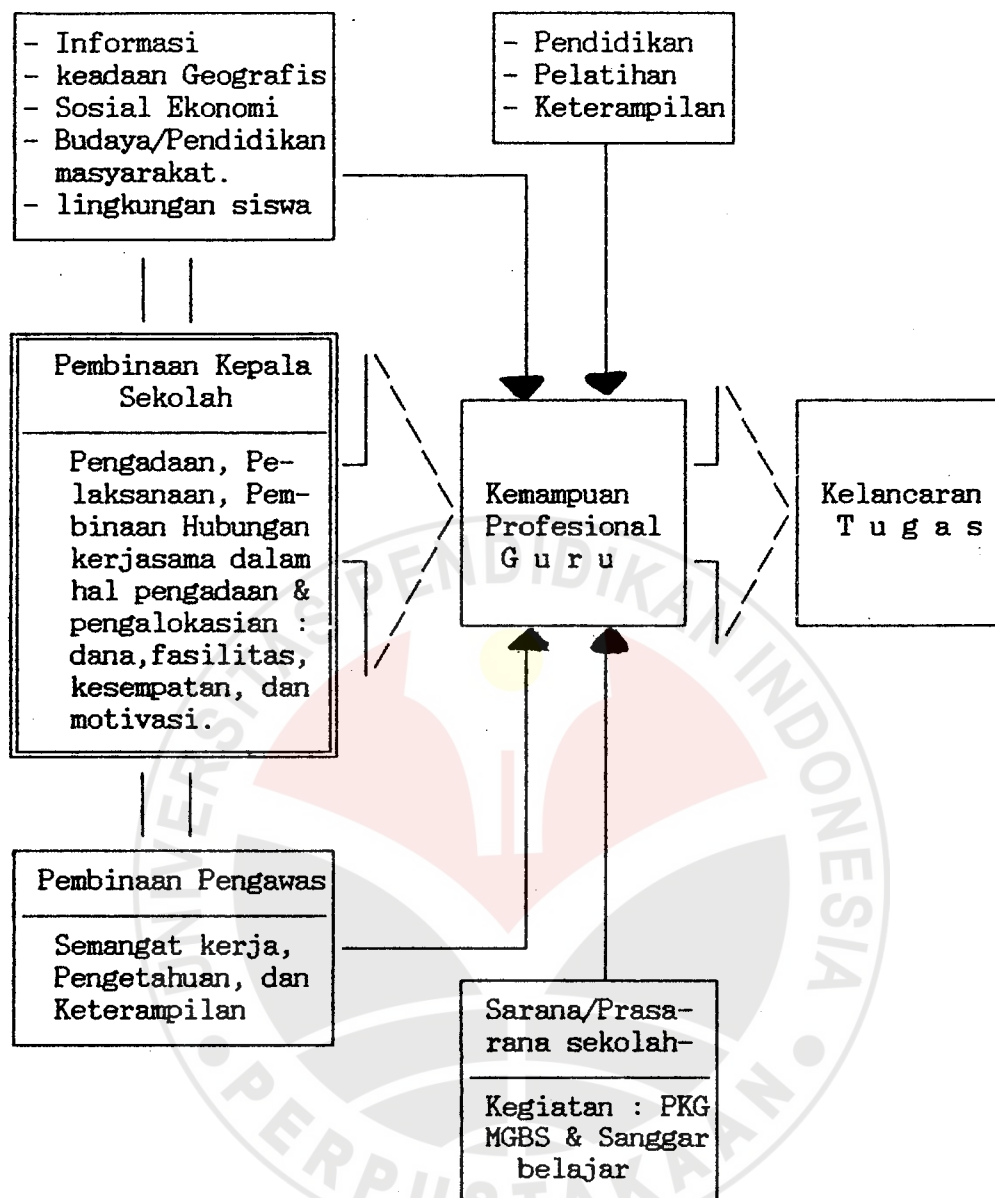
#### **E. Kerangka Penelitian**

Uraian di muka memberikan suatu gambaran bahwa kerangka penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut :





Gambar 1.4



Kerangka penelitian tersebut merupakan jalan pikiran yang ditempuh dalam penelitian berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Kerangka ini

menunjukkan : Pertama, bahwa kemampuan kepala sekolah dalam mengelola bawahan (guru) merupakan hal yang sangat penting, karena guru merupakan ujung tombak terlaksananya proses belajar mengajar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan guru, kepala sekolah perlu melakukan usaha dalam hal pengadaan dana, fasilitas, dan kesempatan. Untuk itu, kepala sekolah hendaknya menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan demikian kepala sekolah akan dapat memberikan bantuan, pelayanan dan motivasi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepala sekolah, dalam hal supervisi seperti memberikan motivasi kepada guru, ia dibantu oleh pengawas Dikmenum.

Kedua, sebagai pengelola personil sekolah, dalam hal pembinaan kemampuan profesional guru, kepala sekolah hendaknya dapat mengusahakan dana, memberikan kesempatan, menyediakan fasilitas, dan menciptakan kondisi sekolah dengan berbagai cara, sehingga guru dapat menyesuaikan dan mengembangkan diri. Ketiga, dengan adanya usaha yang dilakukan kepala sekolah, maka bantuan terhadap kemampuan profesional guru dapat diberikan. Selain usaha itu, dapat ditambah pula dengan bantuan yang diberikan pengawas, sehingga faktor-faktor peningkatan kemampuan profesional guru dapat terlaksana seperti : pendidikan, penataran,

seminar, diskusi, dan kegiatan MGBS. Hal yang paling penting berkenaan dengan bantuan yang diberikan oleh kepala sekolah dan pengawas, guru dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh sosial ekonomi, geografis, kemampuan siswa, dan arus informasi yang pesat. Terakhir, yang ingin dicapai dalam usaha pembinaan yang telah dilakukan adalah terciptanya guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola proses belajar mengajar yang baik. Dengan demikian, dapat mencapai tujuan pendidikan di sekolah dan dapat membina siswa yang kreatif.



